



# Bareskrim Nyatakan JKK Tidak Terlibat

Dugaan Korupsi  
Penjualan  
Kondensat

JAKARTA - Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut nama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan

dugaan korupsi penjualan kondensat, Senin (8/6). Dalam pernyataannya, dia mengungkapkan, penunjukan PT TPPI sebagai perusahaan yang berhak mengelola pen-

jualan kondensat bagian negara oleh BP Migas (sekarang SKK Migas) tidak lepas dari peran JK.  
Namun, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus

Bareskrim Polri Victor Edinson Simanjuntak menegaskan bahwa Jusuf Kalla tidak terkait dengan korupsi penjualan

◆ Ke Halaman 7 kolom 1



## Bareskrim Nyatakan JK Tidak Terlibat

Sambungan dari halaman 1

kondensat tersebut. Menurut dia, JK sudah mengambil keputusan yang wajar saat berupaya menyelamatkan PT TPPI.

"Wapres ambil kebijakan yang benar, hanya tidak dilaksanakan secara benar oleh PT TPPI," ujarnya di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, JK saat itu menyarankan agar kondensat bagian negara dikelola TPPI dengan catatan dijadikan RON 88, solar, dan kerosin untuk dijual ke Pertamina. "Tetapi, ternyata tidak ke Pertamina, malah dijual ke luar negeri melalui

PT Vitol," ungkapnya.

Belakangan, berdasar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), negara mengalami kerugian Rp 2 triliun. Pasalnya, uang hasil penjualan kondensat oleh TPPI kerap tidak diserahkan ke negara.

Sementara itu, Jusuf Kalla mengakui bahwa dirinya sempat memimpin rapat untuk menentukan nasib TPPI yang saat itu terbelit krisis finansial. Hal tersebut dilakukan JK saat menjabat wakil presiden periode 2004-2009. "Kondisi (TPPI) waktu itu sudah buruk," ujarnya setelah menjadi pembicara dalam Green Infrastructure

Summit di Jakarta kemarin.

Dalam rapat pada Mei 2008 itu, pemerintah memutuskan untuk memberikan proyek penjualan kondensat kepada TPPI. Alasannya, TPPI bisa memperbaiki kondisi keuangan perusahaan dan membayar utang ke pemerintah dan Pertamina. "Makanya dikasih kerjaan (menjual kondensat)," ujarnya.

Meski demikian, JK menolak keputusan tersebut dianggap salah dan merugikan negara. Sebab, tidak ada satu hal pun yang dilanggar saat pemerintah memberikan proyek penjualan kondensat kepada TPPI. "Jadi, salahnya

bukan yang *ngasih* kerjaan, tapi karena uangnya tidak dibayar," jelasnya.

Di tempat terpisah, terkait dengan keterangan Sri Mulyani dalam pemeriksaan, Victor menilai sudah cukup. Keterangan Ani, panggilan akrab Sri Mulyani, mengenai surat yang dikeluarkan Kemenkeu dianggap sudah jelas.

Adapun soal minimnya kontrol Kemenkeu dalam menagih uang penjualan ke PT TPPI, dia menyatakan bahwa menteri hanya bertugas sebagai bendahara. "Semestinya ada tim tertentu yang mengontrol," katanya. (far/owi/c5/kim)